



EVALUASI IMPLEMENTASI SIPD DALAM PENGANGGARAN DAERAH PADA BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN BKAD KABUPATEN SUMBAWA

Adellya Dewi Mustika¹, Arya Zulfikar Akbar²

Universitas Teknologi Sumbawa^{1,2}

adellyatika13@gmail.com¹, arya.zulfikar.akbar@uts.ac.id²

INFORMASI ARTIKEL

Diterima : 12/05/2026

Direvisi : 15/05/2026

Disetujui : 28/05/2026

Keywords:

Regional Budgeting,
Accounting, Financial
Reporting, Van Meter And
Van Horn.

Kata Kunci:

Penganggaran Daerah,
Akuntansi, Pelaporan
Keuangan, Van Meter
Dan Van Horn.

ABSTRACT:

Digital transformation through the Regional Government Information System (SIPD) is a crucial step toward creating more transparent and accountable regional financial management. This study aims to evaluate the Regional Government Information System (SIPD) in the budgeting process at the Accounting and Reporting Division of the BKAD Sumbawa Regency, using the Van Meter and Van Horn model as a framework. The research was conducted using a descriptive qualitative approach, collecting data through interviews with four key informants and system document studies. The results indicate that, from a regulatory standpoint, SIPD has been able to integrate the process from planning to reporting and strengthen budget discipline through automatic ceiling locking features. However, several obstacles remain in the field, such as unstable central servers and uneven technical capabilities among staff. To address these issues, implementers made adjustments such as working at night and peer-to-peer learning. A key finding of this research is the "ripple effect," where the quality of financial reports highly depends on the accuracy of data input at the beginning of the budgeting process. Therefore, the researcher suggests that the central government improve server infrastructure and increase technical training in the regions to maintain the quality of financial reporting.

ABSTRAK:

Transformasi digital melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah langkah penting untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses penganggaran di Bagian Akuntansi dan Pelaporan BKAD Kabupaten Sumbawa, dengan memakai model Van Meter dan Van Horn sebagai acuan. Penelitian dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan mengumpulkan data lewat wawancara pada empat informan kunci dan studi dokumen sistem. Hasilnya, secara aturan, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sudah mampu menghubungkan



proses perencanaan sampai pelaporan, serta memperkuat disiplin anggaran lewat fitur penguncian pagu otomatis. Namun, di lapangan masih ada kendala seperti server pusat yang sering tidak stabil dan kemampuan teknis pegawai yang belum merata. Untuk mengatasi masalah ini, para pelaksana melakukan penyesuaian seperti bekerja di malam hari dan saling belajar antar rekan kerja. Temuan penting dari penelitian ini adalah adanya efek berantai, di mana kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada ketelitian input data di awal proses anggaran. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar pemerintah pusat memperbaiki infrastruktur server dan memperbanyak pelatihan teknis di daerah supaya kualitas laporan keuangan tetap terjaga.

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan telah menjadi tuntutan utama untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan transparan. Di tingkat daerah, komitmen ini diwujudkan melalui penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Bagi Kabupaten Sumbawa, landasan operasional transformasi ini dipertegas melalui (Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 121 Tahun 2022, 2022) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses birokrasi, termasuk pengelolaan keuangan, berjalan secara terpadu, akuntabel, dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan teknologi informasi yang semakin berkembang demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini selaras dengan argumen (Alam dkk., 2024) bahwa digitalisasi melalui sistem tunggal merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di era modern.

Pengelolaan keuangan daerah sendiri merupakan aspek fundamental yang memerlukan ketelitian tinggi, terutama dalam tahap penganggaran. Secara hukum, pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020, 2020). Di tingkat regional, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga telah menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi ini menekankan bahwa pengelolaan keuangan harus dilakukan secara efektif dan efisien dengan dukungan sistem informasi yang mampu mengintegrasikan data perencanaan hingga pelaporan dalam satu kesatuan. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan nasional, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) diperkenalkan sebagai platform tunggal untuk menjembatani standarisasi data keuangan di seluruh Indonesia.

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses penganggaran di lingkungan BKAD memang tidak lepas dari berbagai tantangan teknis dan kebutuhan penyesuaian di lapangan. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa transisi ke sistem ini kerap dihadapkan pada masalah seperti kestabilan jaringan, fitur yang belum sepenuhnya optimal, serta perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar mampu mengikuti alur kerja yang baru. Selain itu, penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga diharapkan dapat mengurangi ego sektoral antar OPD dan mempercepat proses penyusunan anggaran yang sesuai dengan standar nasional. Namun, kajian empiris yang secara spesifik membahas implementasi Sistem Informasi Pemerintahan



Daerah (SIPD) pada tahap penganggaran dan dampaknya terhadap kinerja akuntansi serta pelaporan keuangan daerah masih terbatas, meskipun beberapa studi telah menyoroti pentingnya kesiapan organisasi dan adaptasi teknologi dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan (Arif dan Firmansyah, 2024); Jiwandono, 2025; Muttaqin dkk., 2023).

Dalam praktiknya, implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di daerah masih sering dihadapkan pada berbagai kendala teknis yang berdampak langsung pada proses rekonsiliasi dan pelaporan keuangan. Penelitian di Kabupaten Buleleng (Cahyanti & Werastuti, 2025), hambatan seperti keterbatasan jaringan dan kesalahan input data masih menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam pelayanan rekonsiliasi laporan keuangan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kondisi ini tidak hanya memperlambat proses administrasi, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas data yang akan digunakan dalam pelaporan keuangan daerah. Sementara itu, penelitian oleh (Fitriani dan Solikhin, 2025) di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memang membawa pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, terutama jika didukung oleh kesiapan teknologi informasi yang memadai. Dengan demikian, efektivitas SIPD sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengatasi kendala teknis dan memanfaatkan teknologi secara optimal agar akuntabilitas dan transparansi keuangan benar-benar terwujud. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses penganggaran daerah pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan BKAD Kabupaten Sumbawa. Selain itu, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai kendala teknis maupun regulasi yang dihadapi selama proses implementasi, serta merumuskan upaya-upaya strategis yang dapat ditempuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan sistem guna menjamin terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TINJAUAN LITERATUR

Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Dalam membedah dinamika penerapan SIPD, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Model ini tetap menjadi salah satu analisis paling relevan dalam studi kebijakan publik kontemporer karena kemampuannya memetakan hubungan linear antara standar kebijakan, pelaksana, dan kinerja akhir.

Penelitian terbaru dari (Gracya dan Purwanti, 2026) menekankan bahwa dalam konteks sistem informasi pemerintahan, variabel-variabel Van Meter dan Van Horn memberikan pemahaman yang komprehensif melampaui sekadar aspek teknis, melainkan juga menyentuh dimensi kompleksitas birokrasi. Berikut adalah enam variabel utama dalam kerangka kerja ini:

1. Standar dan sasaran kebijakan dalam variabel ini menekankan pada kejelasan dan konsistensi tujuan kebijakan. Dalam penelitian (Sri Rahayu, 2025), keberhasilan kebijakan ditentukan oleh sejauh mana standar tersebut dapat dipahami secara seragam oleh seluruh aktor pelaksana. Pada SIPD, standar ini mencakup kodifikasi dan nomenklatur yang diatur secara nasional untuk menjamin sinkronisasi data.
2. Sumber daya merupakan faktor esensial yang mencakup kapasitas finansial, ketersediaan infrastruktur teknologi, dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Implementasi sistem informasi berbasis web seperti SIPD sangat bergantung pada stabilitas jaringan internet dan kapasitas server pusat. Selain itu, kompetensi teknis



- pelaksana dalam mengoperasikan fitur-fitur kompleks dalam sistem menjadi penentu apakah teknologi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal atau justru menjadi beban administratif baru. (Koswara, 2024) menggarisbawahi bahwa keterbatasan sumber daya finansial dan teknis sering kali menjadi penghambat utama dalam pembangunan infrastruktur digital di tingkat lokal.
3. Komunikasi antarorganisasi yang efektif menjamin bahwa standar dan sasaran dipahami secara seragam oleh seluruh aktor yang terlibat. Dalam sistem yang terintegrasi, koordinasi antar unit kerja, seperti antara Bagian Anggaran, Perbendaharaan, serta Akuntansi dan Pelaporan, menjadi sangat krusial. Kegagalan komunikasi sering kali menjadi penyebab utama terjadinya kesalahan input data yang tidak terdeteksi hingga tahap pelaporan akhir. Penelitian (Akbar dkk., 2025) menunjukkan bahwa komunikasi dua arah yang aktif dapat memicu respons cepat dan meminimalisir salah persepsi dalam pelaksanaan regulasi.
 4. Struktur birokrasi, budaya kerja, serta pola hubungan di dalam organisasi sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan inovasi di lingkungan pemerintah daerah. Organisasi yang memiliki budaya kerja terbuka terhadap perubahan dan adaptif terhadap teknologi akan lebih mudah menerima dan menjalankan inovasi digital. Selain itu, kepemimpinan yang mampu memberikan teladan dan mendorong komitmen bersama menjadi faktor penting agar setiap anggota organisasi dapat menjalankan tugas sesuai mandat yang diberikan. Temuan dari (Oktaviani dkk., 2025) menunjukkan bahwa struktur birokrasi, budaya organisasi, dan kepemimpinan transformasional berpengaruh nyata terhadap kinerja organisasi pemerintah.
 5. Lingkungan eksternal memberikan tekanan dan dukungan terhadap proses implementasi. Tekanan politik untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sering kali menjadi pendorong bagi pemerintah daerah untuk mempercepat adopsi sistem informasi yang akuntabel. Kondisi ekonomi daerah juga menentukan kemampuan fiskal untuk menyediakan infrastruktur penunjang teknologi informasi yang memadai. Hal ini sejalan dengan temuan (Basri dkk., 2021) yang menunjukkan bahwa tekanan eksternal dan faktor politik berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan pengelolaan keuangan daerah.
 6. Disposisi pelaksana mencakup sikap, pemahaman, dan kemauan para pelaksana kebijakan untuk menjalankan tugasnya. Meskipun sistem telah tersedia, efektivitasnya tetap bergantung pada penerimaan para aparatur di lapangan. Sikap positif yang ditunjukkan melalui kemauan untuk belajar dan beradaptasi dengan perubahan sistem merupakan modal penting dalam mengatasi hambatan teknis yang muncul selama masa transisi. Disposisi pelaksana sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan, karena sikap dan pemahaman aparatur akan menentukan sejauh mana kebijakan dapat dijalankan sesuai tujuan yang diharapkan (Aprilia dkk., 2023).

Landasan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Implementasi teknologi informasi dalam pemerintahan di Kabupaten Sumbawa didasarkan pada beberapa instrumen hukum yang kuat. Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 121 Tahun 2022, pemerintah daerah berkomitmen menjalankan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan keterpaduan layanan. Hal ini



sejalan dengan (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022, 2022) yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel melalui dukungan sistem informasi yang terintegrasi. Secara nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 menetapkan SIPD sebagai satu-satunya platform dalam pengelolaan satu data keuangan daerah, yang wajib diterapkan mulai dari tahap penyusunan anggaran hingga pelaporan.

Konsep Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Sesuai (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, 2019), SIPD adalah sistem yang mendokumentasikan dan mengolah data pembangunan serta keuangan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada publik. Dalam konteks penganggaran, SIPD berfungsi untuk menyeragamkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan serta keuangan di seluruh Indonesia. Penggunaan sistem tunggal ini bertujuan untuk meminimalisir duplikasi anggaran dan mempercepat sinkronisasi data pusat-daerah. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital dan stabilitas sistem yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.

Peran Bagian Akuntansi dan Pelaporan dalam Penganggaran

Bagian Akuntansi dan Pelaporan pada BKAD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa data penganggaran yang diinput ke dalam SIPD memiliki validitas yang tinggi. Proses penganggaran bukan hanya soal pengalokasian angka, tetapi juga mengenai bagaimana angka tersebut diklasifikasikan secara akuntansi agar nantinya dapat dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Ketidakesesuaian input pada fase penganggaran di SIPD akan berakibat fatal pada tahap penatausahaan dan penyajian laporan keuangan akhir tahun.

Penelitian Terdahulu

Beberapa studi empiris memberikan gambaran mengenai tantangan penerapan SIPD. (Nasution & Nurwani, 2021) di BPKAD Kota Medan menemukan kendala pada kualitas sistem dan minimnya waktu bimbingan teknis. (Chandra Pramana dkk., 2023) di Kabupaten Nganjuk juga mencatat bahwa SIPD belum optimal karena fitur yang belum lengkap sehingga daerah masih memerlukan aplikasi pendamping. Sementara itu, penelitian (Hunairah Rezkiaty dkk., 2024) di Kabupaten Bulukumba menyoroti bahwa meskipun terdapat kendala teknis, SIPD secara signifikan mampu meningkatkan transparansi laporan keuangan. Penelitian ini mengisi celah dengan mengevaluasi secara khusus kesesuaian implementasi tersebut dengan kebijakan SPBE di Kabupaten Sumbawa (Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 121 Tahun 2022).

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penganggaran di lingkungan Bagian Akuntansi dan Pelaporan BKAD Kabupaten Sumbawa. Metode deskriptif digunakan untuk memaparkan situasi nyata di lapangan terkait penerapan SIPD, termasuk hambatan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil untuk



mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam memahami penerapan SIPD, penelitian ini mengacu pada model penerapan kebijakan Van Meter dan Van Horn, yang menyoroti enam aspek utama: standar dan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik pelaksana, kondisi lingkungan, serta disposisi pelaksana.

Lokasi dan Informan Penelitian

Penelitian dipusatkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumbawa, khususnya pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan serta Bagian Akuntansi Keuangan Daerah. Penelitian dilakukan kurang lebih satu bulan. Informan penelitian ditentukan melalui teknik *purposive* sampling untuk menjamin keterwakilan kompetensi dan otoritas.

Tabel 1 Daftar Informan dari Bagian Akuntansi dan Pelaporan

Kode Informan	Jabatan / Peran	Tanggung Jawab dalam SIPD
Informan 1	Kepala sub bidang Akuntansi dan Pelaporan	Manajerial pelaporan keuangan dan koordinasi audit BPK.
Informan 2	Kepala sub bidang Akuntansi Keuangan Daerah	Pengawasan alur penganggaran dan verifikasi pagu OPD.
Informan 3	Staf Akuntansi Keuangan Daerah	Operasional verifikasi dokumen dan input harian.
Informan 4	Staf Akuntansi dan Pelaporan	Rekonsiliasi data dan penyusunan laporan keuangan final.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat struktural dan staf teknis Bagian Akuntansi dan Pelaporan BKAD Kabupaten Sumbawa, yang terlibat langsung dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada proses penganggaran daerah. Data sekunder bersumber dari dokumen dan peraturan yang relevan, meliputi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 mengatur tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 121 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta dokumen internal BKAD yang terkait dengan penganggaran dan pelaporan keuangan daerah.

Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan para pemangku kepentingan kunci di bagian Akuntansi dan Pelaporan BKAD Kabupaten Sumbawa. Penggunaan teknik semi-terstruktur dipilih karena memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk mengembangkan pertanyaan berdasarkan respon informan, namun tetap berpegang



pada daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis. Hal ini sangat berguna untuk menggali informasi yang bersifat teknis maupun administratif yang mungkin tidak terduga sebelumnya. Selain wawancara, penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi sebagai instrumen pengumpulan data sekunder. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem, catatan verifikasi anggaran, serta melakukan pengamatan langsung terhadap prosedur operasional sistem. Salah satu aspek penting dalam dokumentasi ini adalah pengamatan terhadap proses masuk ke dalam web Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan navigasi menu dashboard. Dokumentasi ini memberikan bukti empiris mengenai kompleksitas sistem dan kendala teknis yang nyata dihadapi oleh pengguna.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif. Proses analisis meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan memfokuskan hasil wawancara, serta pendukung data agar sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk menggambarkan temuan penelitian secara sistematis. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan memahami pola dan tema yang muncul terkait implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses penganggaran daerah. Analisis temuan dikaitkan dengan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn untuk menilai efektivitas implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dinamika Transisi dan Integrasi Sistem

Informan 1 menjelaskan bahwa sebelum beralih ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang dikelola oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Transisi ini merupakan perintah langsung dari Kementerian Dalam Negeri untuk mewujudkan integrasi data satu pintu secara nasional. Informan 2 mengatakan bahwa integrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) mencakup seluruh siklus, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Dari sisi manajerial, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dinilai lebih baik dalam hal kontrol internal karena kemungkinan perbedaan data antar tahapan keuangan menjadi sangat kecil. Namun, Informan 1 juga mengungkapkan bahwa pada tahun-tahun awal penggunaan, penyusunan laporan keuangan belum bisa dilakukan sepenuhnya secara digital dan masih memerlukan bantuan proses manual karena modul pelaporan belum siap.

Kendala Teknis dan Strategi Adaptasi SDM

Seluruh informan melaporkan bahwa hambatan utama terletak pada stabilitas server pusat yang sering mengalami *downtime* pada jam operasional kantor. Informan 3 dan 4 mengaku sering terpaksa bekerja di luar jam kerja (malam hari) karena sistem lebih lancar saat trafik penggunaan nasional menurun. Strategi teknis darurat seperti penggunaan *tethering* ponsel juga dilakukan untuk memastikan apakah kendala terletak pada jaringan lokal atau server kementerian. Mengenai kompetensi, Informan 2 mengakui bahwa kemampuan SDM di lingkungan pemerintah daerah tidak merata. Informan 3 mengungkapkan bahwa ia belum



pernah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) resmi dan mempelajari sistem secara otodidak melalui diskusi dengan rekan sejawat. Strategi berbagi pengetahuan antar staf (*peer-to-peer learning*) dinilai lebih efektif dibandingkan modul panduan resmi karena mampu menjawab kasus-kasus teknis yang spesifik di lapangan.

Mekanisme Pengendalian dan Kualitas Data

Informan 2 menjelaskan bahwa SIPD memiliki fitur penguncian pagu otomatis yang mencegah OPD melakukan belanja melebihi anggaran yang ditetapkan. Meski demikian, Informan 4 sering menemukan ketidaksinkronan angka ketika menarik data dari modul keuangan ke modul pelaporan. Hal ini disebabkan oleh dua faktor: *human error* saat penginputan oleh petugas OPD dan gangguan sinkronisasi pada sistem itu sendiri. Untuk menjaga akurasi data, Informan 4 melakukan rekonsiliasi kas setiap hari dengan membandingkan saldo sistem terhadap rekening koran bank. Komunikasi dengan OPD yang melakukan kesalahan input dilakukan melalui *WhatsApp* atau dengan memanggil petugas terkait untuk memberikan klarifikasi langsung.

Karakteristik Input Data dan Perilaku Kepatuhan OPD

Berdasarkan penuturan Informan 2, meskipun sebagian besar petugas perencana di OPD sudah memahami alur sistem, masih sering ditemukan praktik input data yang dilakukan secara terburu-buru demi mengejar kecepatan administrasi. Akibatnya, Informan 1 menyatakan bahwa BKAD harus melakukan proses verifikasi, validasi, dan pengesahan berlapis untuk mengoreksi kesalahan pemilihan akun atau nomenklatur oleh OPD.

Dinamika Kompetensi dan Kemandirian Aparatur

Informan 2 mengakui bahwa kompetensi SDM di lingkungan pemerintah daerah belum merata. Informan 3 secara spesifik mengungkapkan bahwa dirinya belum pernah mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) resmi SIPD dan menguasai sistem secara otodidak. Hal ini dikonfirmasi oleh Informan 4 yang menyatakan bahwa diskusi dengan rekan kerja jauh lebih efektif untuk memecahkan kasus lapangan daripada sekadar membaca modul panduan resmi.

Integrasi Antar Modul dan Konsistensi Data

Informan 4 sering menemukan ketidaksinkronan angka ketika menarik data dari modul keuangan ke modul pelaporan. Masalah ini bisa disebabkan oleh bug sistem atau kesalahan input awal. Untuk menjaga akurasi, Informan 4 melakukan rekonsiliasi kas secara manual setiap hari dengan membandingkan saldo sistem terhadap rekening koran bank sebagai langkah verifikasi tambahan.

Adaptasi Tata Kelola Berdasarkan Rekomendasi Audit

Informan 1 menjelaskan adanya perubahan tugas pokok berdasarkan rekomendasi BPK tahun 2024. Kewenangan rekonsiliasi kas daerah dialihkan ke Bidang Perbendaharaan, sementara Bagian Akuntansi dan Pelaporan kini lebih fokus pada rekonsiliasi non-kas seperti BLUD dan dana BOS. Perubahan ini menuntut koordinasi lintas bidang yang lebih intensif untuk memastikan laporan keuangan tetap konsisten.

Implementasi SIPD di BKAD Kabupaten Sumbawa menunjukkan komitmen kepatuhan terhadap regulasi Permendagri, di mana penggunaan sistem lama (SIMDA) telah



dihentikan sepenuhnya. Hal ini berbeda dengan temuan (Muttaqin dkk., 2023) di Kota Probolinggo yang masih menjalankan sistem secara paralel (*double entry*) antara SIMRAL dan SIPD akibat ketidaksiapan fitur sistem. Namun, penghentian total sistem lama di BKAD Sumbawa menimbulkan tantangan tersendiri pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan ketika SIPD mengalami gangguan teknis atau ketidaksinkronan data, petugas tidak lagi memiliki sistem cadangan, sehingga proses pelaporan sangat bergantung pada stabilitas server pusat.

Dampak Proses Penganggaran Terhadap Akuntansi Dan Pelaporan

Temuan krusial dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh timbal balik yang sangat kuat antara kualitas proses penganggaran dengan efektivitas fungsi akuntansi. SIPD yang dirancang sebagai sistem terintegrasi menyebabkan setiap kesalahan pada tahap awal (input anggaran) akan terbawa secara otomatis (*cascading*) ke tahap pelaporan keuangan.

- 1) Akurasi laporan keuangan, jika data penganggaran diinput secara presisi sesuai dengan nomenklatur dan kode rekening yang tepat sejak awal, maka modul pelaporan akan menghasilkan angka yang valid tanpa perlu banyak penyesuaian. Sebaliknya, kesalahan input di awal memaksa tim akuntansi untuk melakukan "pengobatan" data melalui jurnal koreksi atau penghapusan dan penginputan ulang yang memakan waktu lama.
- 2) Fungsi kontrol akuntansi, bagian Akuntansi dan Pelaporan kini tidak hanya berfungsi mencatat transaksi, tetapi juga berperan sebagai filter terakhir dalam memverifikasi kualitas data yang diinput oleh OPD pada fase penganggaran. Integrasi ini menuntut staf akuntansi untuk memiliki pemahaman mendalam mengenai struktur anggaran guna mencegah kesalahan fatal saat penyusunan laporan keuangan akhir tahun.
- 3) Efisiensi audit dan transparansi, proses penganggaran yang tertib dalam sistem mempermudah penarikan data untuk kebutuhan audit BPK. Rekonsiliasi kas harian yang dilakukan sebagai respon terhadap ketidakstabilan sistem membuktikan bahwa proses akuntansi yang disiplin mampu memitigasi risiko kesalahan data anggaran yang belum tersinkronisasi secara sempurna di dalam sistem.

SIMPULAN

Implementasi SIPD di BKAD Kabupaten Sumbawa secara substansi telah berhasil menyatukan alur pengelolaan keuangan daerah dari tahap penganggaran hingga pelaporan sesuai mandat regulasi nasional. Integrasi ini memberikan dampak positif berupa peningkatan disiplin anggaran melalui mekanisme penguncian pagu otomatis yang meminimalisir penyalahgunaan anggaran di tingkat unit kerja. Namun, efektivitas operasional sistem masih dibayangi oleh keterbatasan infrastruktur server pusat dan ketidaksiapan kompetensi SDM teknis secara merata. Keberlanjutan sistem di daerah ini justru lebih banyak ditopang oleh resiliensi aparatur melalui adaptasi pola kerja malam hari, penggunaan koneksi internet alternatif (*tethering*), dan modal sosial berupa pembelajaran mandiri antar rekan sejawat. Penelitian ini memunculkan pokok pikiran baru bahwa digitalisasi keuangan daerah telah menggeser titik kritis akuntabilitas; validitas laporan keuangan kini bukan lagi semata-mata tanggung jawab bagian akuntansi di hilir, melainkan sangat ditentukan oleh integritas data di hulu pada tahap input anggaran. Fenomena ini menunjukkan adanya transformasi peran



akuntansi dari sekadar pencatat transaksi menjadi instrumen pengendali kualitas data sejak awal siklus anggaran dimulai.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., Bestari, P., & Mahpudz, A. (2025). Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Tinjauan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kebon Jayanti. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(2), 1–11. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.2808>
- Alam, S., Anwar, A. F., Wahyuddin, A., Pada, A. T., & Anwar, P. H. (2024). Optimalisasi Kebijakan Smart Governance: Studi Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Transformatif*, 10(2), 144–169. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2024.010.02.1>
- Aprilia, D., Denny Hernawan, & Neng Virly Apriliani. (2023). Pengaruh Faktor Disposisi Dalam Implementasi Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Dalam Pengelolaan Dana Hibah Koperasi. *Karimah Tauhid*, 2(5), 1829–1837. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i5.10083>
- Arif, R. N., & Firmansyah, A. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) Dalam Proses Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. *Akuntansiku*, 3(1), 15–29. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i1.630>
- Basri, Y. M., Zenita, V., & Rofika, R. (2021). Tekanan Eksternal, Faktor Politik, Pengendalian Internal Dan Gaya Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Kajian Akuntansi*, 22(1), 88–108. <https://doi.org/10.29313/ka.v22i1.6954>
- Cahyanti, K. G. S., & Werastuti, D. N. S. (2025). Penerapan, Hambatan, dan Solusi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pelayanan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD di BPKPD Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 14(2), 347–358. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/80176?utm>
- Chandra Pramana, A., Yap, N., Rukmini, M., Mahmudi, S., & Agustina, E. (2023). Analisis Penerapan SIPD Pada BPKAD Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Ekuivalensi*, 9(1), 45–58. <https://ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Ekuivalensi/article/view/926>
- Fitriani, L., & Solikhin, A. (2025). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Dimoderasi Oleh Teknologi Informasi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(05), 1548–1561. <https://doi.org/10.22437/Jmk.V13i05.32328>
- Gracya, R., & Purwanti, L. (2026). Implementation of Regional Government Information System Policy (SIPD) in Yapen Islands Regency: Using Van Meter and Van Horn Models. *Summa : Journal of Accounting and Tax*, 4(1), 27–41.
- Hunairah Rezkiaty, A., Alam, S., & Tenriwaru. (2024). SEIKO : Journal of Management & Business Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 7(2), 464–478. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/7178/4803>



- Jiwandono, D. (2025). Analisis Efektivitas Implementasi Sipd dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *JURNAL AKUNTANSI LANCANG KUNING*, 2(1), 14–25.
- Koswara, A. (2024). Digitalisasi Ekonomi di Pedesaan: Mengkaji Kesenjangan Infrastruktur Digital di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 5(3), 180. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v5i3.3407>
- Muttaqin, I., Adiranti, U., & Zakiyah, R. D. (2023). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPPKAD Kota Probolinggo. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Ekonomi*, 9(1), 2310–2318.
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.29103/Jak.V9i2.4577>
- Oktaviani, L., Istianda, M., & Kuswandi, A. (2025). Pengaruh Struktur, Budaya, Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah dengan Kepemimpinan Transformasional sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10(2), 279–305. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.5276>
- Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 121 Tahun 2022, 1 (2022). <https://ildis.sumbawakab.go.id/assets/dokumen/perbupnomor121tahun2022.pdf>
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022, 1 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/273474/perda-kab-sumbawa-no-2-tahun-2022>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, 1 (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/127924/permendagri-no-70-tahun-2019>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020, 1 (2020). <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/162792/Permendagri-No-77-Tahun-2020>
- Sri Rahayu, R. (2025). Implementation Of Development Planning Nomenclature In The Regional Government Information System (Sipd) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Article History. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 14(4), 2737–2743. <https://Ejournal.Unibabwi.Ac.Id/Index.Php/Sosioedukasi/Index>